



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 /180/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Program Penyusunan yang selanjutnya disebut Progsun.
 2. Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU.
 3. Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disingkat PP.
 4. Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut Perpres.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Permendagri.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Permenpan RB.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut Permenkes.
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Perda.
 9. Peraturan Wali Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Perwako.
 10. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Ranperwako.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa.
 14. Target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
16. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
17. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
18. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN.

- KEDUA : Daftar Ranperwako untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *h*


ROBERIA *ra*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>h 25/ 25</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	<i>h 25/ 25</i> <i>25/ 25</i>



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 /180/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
1.	Standar Harga Satuan Desa.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2025 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Januari 2025
2.	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun 2025.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2025 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Januari 2025
3.	Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2026 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Januari 2025
4.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah	Bagian Organisasi	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	Pemerintah Kota Pariaman. Maret 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Kota Pariaman.		Dasar Hukum: Permenpan RB 1 Tahun 2020		
5.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.	Bagian Organisasi	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 1 Tahun 2023	Pedoman bagi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terkait Tata Naskah Dinas.	Pemerintah Kota Pariaman. Maret 2025
6.	Teknis Pembemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.	BPKPD	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keriga Belas kepada ASN di Pemerintah Kota Pariaman. Dasar Hukum: PP Nomor 14 Tahun 2024	Pengaturan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN di Pemerintah Kota Pariaman.	Pemerintah Kota Pariaman. Maret 2024
7.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	BPKPD	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar Hukum: 1. UU Nomor 1 Tahun 2022; 2. Perda Nomor 1 Tahun 2024.	1. Tata cara penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 2. Tata Cara perhitungan Nilai sewa reklame 3. Besaran nilai perolehan air tanah; 4. Masa pajak dan tahunan pajak; 5. Pemanfaatan penerimaan retribusi; dan 6. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi.	Pemerintah dan Masyarakat Kota Pariaman. Maret 2024
8.	Dokumen	Bappeda	1. Sebagai upaya	Berisi profil	Pemerintah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Pemutakhiran Stategi Sanitasi Kota Pariaman Tahun 2022-2027.		mewujudkan pembangunan sanitasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, perlu perencanaan yang berkualitas sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sanitasi; dan 2. Dokumen strategis sanitasi kota sudah disepakati secara nasional sebagai dokumen perencanaan strategis bidang sanitasi yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan sanitasi 5 tahun kedepan.	sanitasi, kebijakan dan strategi serta program kegiatan pembagunan sanitasi secara komprhensif untuk memberikan arah yang jeas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di kota untuk 5 (lima) tahun kedepan.	Kota Pariaman. Maret 2024
9.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum.	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: Permenhub Nomor 27 Tahun 2018	Struktur organisasi dan tata kerja.	Dishub. Mei 2025
10.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Minum.	Bagian Organisasi	Perubahan perangkat daerah menjadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas juga berubah dan melaksanakan	Struktur organisasi dan tata kerja.	DPUPRP dan pihak terkait. Mei 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: PP 122 Tahun 2015		
11.	Dinas Kesehatan.	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian dan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan. Dasar Hukum: Permenkes 5 Tahun 2022	Struktur organisasi dan tata kerja.	Dinas Kesehatan. Mei 202
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	Bagian Organisasi	Perubahan perwako untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif agar selaras dengan nomenklatur dan pengelompokan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Susunan organisasi dan tata kerja.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mei 2025
13.	Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-	Peta jabatan.	ASN Kota Pariaman. Mei 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			undangan dalam menetapkan peta jabatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dasar Hukum: PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2020		
14.	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/m.sm.01.00/2024 tanggal 8 Januari 2024. Dasar Hukum: PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013	Kelas Jabatan.	ASN Kota Pariaman. Mei 2025
15.	Standar Harga Satuan.	BPKPD	Kebutuhan dalam Penyusunan APBD. Dasar Hukum: Perpres 33 Tahun 2020	Penyusunan APBD Kota Pariaman.	Pemerintah Kota Pariaman. Juni 2025
16.	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.	Bagian Organisasi	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permenpan RB 7 Tahun 2022	Untuk menciptakan Penyederhanaan Birokrasi melalui struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
17.	Analisis Standar Belanja Tahun 2026.	BPKPD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 77 Tahun 2020	Penyusunan APBD Kota Pariaman.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
18.	Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2026.	BPKPD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 77 Tahun 2020	Penyusunan APBD Kota Pariaman.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
19.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.	Bappeda	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 86 Tahun 2017	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
20.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.	Bappeda	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 86 Tahun 2017	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
21.	Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman Tahun 2025-2045.	DPUPRP	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: 1. UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman Tahun 2025.	Pemerintah Kota Pariaman. September 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			2. PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Perda 5 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pariaman Tahun 2022-2042.		
22.	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2025-2029.	Bappeda	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun; 2. Perpres 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi; 3. Perpres 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan strategis pangan dan gizi.	Materi Pokok: 1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan Pedoman Rencana Aksi Bidang Pangan dan Gizi yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pemenuhan pangan dan Gizi masyarakat; 2. Penyusunan program yang spesifik untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi; dan 3. Menetapkan indikator dalam memantau pelaksanaan rencana aksi. Ruang lingkup: 1. Peningkatan	Masyarakat Kota Pariaman. September 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
				<p>ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;</p> <p>2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;</p> <p>3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi; dan</p> <p>4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.</p>	
23.	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2028.	Bappeda	<p>Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 dan pencapaian TPB/SDGs.</p> <p>Dasar Hukum: UU 18 Tahun 2012</p>	<p>Materi Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Situasi; 2. Rencana Aksi; 3. Pelaksanaan Rencana Aksi; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. <p>Ruang Lingkup Faktor Determinan Pangan dan Gizi Terintegrasi.</p> <p>Objek Pengaturan Pangan dan Gizi.</p>	<p>Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas berdaya saing dan meningkatnya ketahanan pangan.</p> <p>Oktober 2024</p>
24.	Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah	Bagian Organisasi	Melaksanakan Ketentuan Peraturan	Pedoman bagi Perangkat Daerah yang	Tersusunnya Peraturan tentang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Kota Pariaman.		Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 10 Tahun 2024	ada di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terkait Pakaian Dinas Dinas.	Pakaian Dinas. Oktober 2025
25.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Penyusunan Rencana Strategis.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025
26.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025
27.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Penyusunan Tata Kelola.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025
28.	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun 2026.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2026 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025
29.	Pedoman Penyusunan APB Desa 2026.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Penyusunan APB Desa Tahun 2026 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018		
30.	Tata Cara Penyaluran Anggaran Dana Desa Tahun 2026.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2026 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *h*

ROBERIA *h*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>f 25/1/24</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	<i>f 25/1/24</i>
PERANCANG PERATURAN KABUPATEN/PANGKALAN	<i>20/1/24</i>